

MEDIA SEBAGAI OBJEK RISET ATAU ALAT KEKUASAAN: REFLEKSI KRITIS STUDI KOMUNIKASI

Angga Arif Pratama Siregar
Universitas Islam Riau

anggaarifpratamasiregar@student.uir.ac.id

Abstrak

Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang produksi makna dan arena pertarungan kepentingan. Dalam perkembangan studi komunikasi, media dapat dipahami baik sebagai objek riset ilmiah maupun sebagai alat kekuasaan yang memengaruhi opini publik. Perspektif kritis menempatkan media dalam relasi erat dengan struktur ekonomi, politik, dan ideologi yang membentuk isi serta praktik komunikasinya. Penelitian ini bertujuan merefleksikan posisi media dalam studi komunikasi dengan menelaah bagaimana media dikonstruksi sebagai objek kajian akademik sekaligus instrumen kekuasaan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur kritis terhadap teori komunikasi, ekonomi politik media, serta studi budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa media tidak bersifat netral, melainkan terikat pada kepentingan institusional dan relasi dominasi tertentu. Oleh karena itu, studi komunikasi perlu mengembangkan sikap reflektif-kritis agar mampu membaca media tidak hanya sebagai teknologi informasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang membentuk realitas.

Kata Kunci: media, studi komunikasi, kekuasaan, refleksi kritis, ekonomi politik media.

Abstract

Media functions not only as a channel of information distribution but also as a space for meaning production and an arena of competing interests. In communication studies, media can be understood both as an object of academic research and as an instrument of power that shapes public opinion. A critical perspective places media within economic, political, and ideological structures that influence its content and communication practices. This study aims to reflect on the position of media in communication studies by examining how media is constructed as a research object and as a tool of social power. The research employs a qualitative approach through critical literature analysis of communication theories, political economy of media, and cultural studies. The findings indicate that media is not neutral but embedded in institutional interests and relations of dominance. Therefore, communication studies must develop a critical-reflective stance to understand media not merely as information technology but as a social force shaping reality.

Keywords: media, communication studies, power, critical reflection, political economy of media.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam kehidupan sosial manusia. Media tidak lagi sekadar sarana penyampaian informasi, tetapi telah menjadi infrastruktur utama dalam pembentukan realitas sosial. Melalui media, individu memperoleh pengetahuan, membentuk opini, serta menegosiasikan identitas dan nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, media tidak bisa dipahami hanya sebagai perangkat teknis, melainkan sebagai institusi sosial yang memiliki kekuatan simbolik dan struktural. Van Dijck (2021) menegaskan bahwa media digital telah berevolusi menjadi ekosistem yang dikendalikan oleh platform-platform besar yang memiliki pengaruh kuat terhadap arus informasi global. Hal ini

menunjukkan bahwa media berada dalam jantung relasi antara teknologi, ekonomi, dan kekuasaan. Dalam disiplin studi komunikasi, media menjadi objek riset yang fundamental karena media adalah ruang utama terjadinya proses komunikasi modern. Media memediasi hubungan antara individu dengan realitas sosial yang lebih luas. Couldry dan Mejias (2023) menjelaskan bahwa media berfungsi sebagai sistem makna yang mengorganisasi bagaimana manusia memahami dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian tentang media tidak hanya mencakup analisis pesan, tetapi juga melibatkan kajian terhadap struktur produksi, distribusi, dan konsumsi konten. Kompleksitas ini menjadikan media sebagai objek akademik yang terus berkembang seiring perubahan teknologi dan dinamika sosial.

Namun, di balik fungsi informatifnya, media juga memiliki peran strategis sebagai alat kekuasaan. Media dapat menentukan isu apa yang layak diperbincangkan publik dan bagaimana isu tersebut dibingkai. Kemampuan ini memberikan media posisi penting dalam pembentukan agenda publik dan opini masyarakat. Fuchs (2022) menegaskan bahwa industri media dalam kapitalisme digital mengubah perhatian publik menjadi komoditas yang diperjualbelikan kepada kepentingan ekonomi dan politik. Dengan demikian, media bukan hanya sarana netral penyampai fakta, tetapi turut memproduksi realitas sesuai kepentingan aktor dominan. Relasi antara media dan kekuasaan politik semakin terlihat dalam praktik komunikasi politik kontemporer. Aktor politik memanfaatkan media untuk membangun citra diri, menyebarkan ideologi, dan memperoleh dukungan publik. Media menjadi ruang strategis bagi kampanye politik, propaganda, serta legitimasi kekuasaan. Strömbäck dan Esser (2021) menjelaskan bahwa hubungan antara media dan politik bersifat simbiotik: media membutuhkan kekuasaan sebagai sumber informasi, sementara kekuasaan membutuhkan media sebagai sarana membentuk legitimasi. Relasi ini menempatkan media dalam posisi krusial dalam sistem demokrasi modern.

Di era media digital, kekuasaan media semakin diperkuat oleh kehadiran platform media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (Twitter) tidak hanya menyediakan ruang komunikasi, tetapi juga mengendalikan distribusi informasi melalui sistem algoritma. Algoritma menentukan konten apa yang akan terlihat, populer, atau tersembunyi dari perhatian publik. Gillespie (2022) menyebut fenomena ini sebagai *algorithmic governance*, yaitu bentuk baru kekuasaan media yang bekerja secara tidak terlihat tetapi sangat menentukan arus informasi sosial. Akibatnya, kekuasaan media tidak lagi hanya berada pada redaksi media konvensional, tetapi juga pada perusahaan teknologi global. Selain itu, media berperan besar dalam produksi representasi sosial. Media membentuk cara masyarakat memahami isu gender, kelas sosial, agama, budaya, dan identitas nasional. Representasi yang dihadirkan media dapat memperkuat stereotip atau justru membuka ruang kesadaran kritis. Gray dan Lotz (2022) menegaskan bahwa media populer menjadi ruang utama pembentukan budaya kontemporer dan nilai-nilai sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat. Dengan kata lain, media tidak hanya merefleksikan budaya, tetapi juga membentuknya.

Dari sisi akademik, perkembangan riset media menunjukkan bahwa media merupakan objek penelitian multidimensional. Penelitian media mencakup analisis teks, audiens, teknologi, industri, serta konteks sosial-politik yang melingkupinya. Hal ini menuntut pendekatan metodologis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif dan kritis. Deuze (2023) menyatakan bahwa studi media modern harus memadukan analisis empiris dengan kesadaran terhadap relasi kekuasaan agar dapat memahami media sebagai praktik sosial yang dinamis. Ketegangan antara media sebagai objek riset ilmiah dan media sebagai alat kekuasaan menimbulkan kebutuhan akan refleksi kritis dalam studi komunikasi. Jika media hanya dilihat sebagai objek teknis penelitian, maka dimensi ideologi dan dominasi yang bekerja di dalamnya akan terabaikan. Sebaliknya, jika media hanya dipahami sebagai alat kekuasaan, maka aspek akademik dan ilmiahnya akan tereduksi. Couldry (2024) menegaskan bahwa studi komunikasi

kritis bertugas menjembatani dua posisi ini agar media dapat dianalisis secara utuh sebagai fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya sekaligus.

Selain itu, tantangan terbesar studi media kontemporer adalah meningkatnya banjir informasi dan disinformasi di ruang digital. Informasi palsu, hoaks, dan manipulasi narasi semakin mudah menyebar melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga alat produksi realitas palsu yang dapat mengancam kualitas demokrasi. Wardle dan Derakhshan (2022) menegaskan bahwa krisis informasi di era digital menuntut pendekatan kritis dalam memahami peran media sebagai kekuatan sosial yang sangat berpengaruh. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media menempati dua posisi utama dalam studi komunikasi: sebagai objek riset akademik yang kompleks dan sebagai alat kekuasaan yang memengaruhi struktur sosial. Kedua posisi ini saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian reflektif-kritis agar studi komunikasi mampu membaca media tidak hanya sebagai teknologi komunikasi, tetapi juga sebagai institusi kekuasaan yang membentuk opini publik, identitas sosial, dan arah perkembangan masyarakat modern.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan secara kritis posisi media sebagai objek riset dalam studi komunikasi sekaligus sebagai alat kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis bagaimana relasi ekonomi, politik, dan teknologi membentuk praktik media, serta bagaimana implikasinya terhadap pembentukan opini publik, konstruksi realitas sosial, dan kualitas demokrasi di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena media sebagai objek riset dan sekaligus sebagai alat kekuasaan dalam studi komunikasi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara kontekstual dan interpretatif, sehingga makna di balik praktik media dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau pengukuran kuantitatif, tetapi pada penggambaran proses, struktur, dan dinamika media dalam membentuk realitas sosial. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena yang dikaji tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan bagaimana media diposisikan sebagai objek kajian akademik sekaligus sebagai institusi yang menjalankan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena media sebagaimana adanya, berdasarkan temuan literatur dan teori komunikasi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemaparan yang jelas mengenai karakteristik media, struktur industri media, serta implikasi sosial dan politik dari praktik media modern.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan riset, serta dokumen resmi yang membahas teori media, komunikasi kritis, ekonomi politik media, dan transformasi media digital. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi tema, kredibilitas penulis, serta kebaruan tahun publikasi, khususnya pada rentang 2021-2025. Pemilihan literatur yang mutakhir bertujuan agar penelitian mampu menangkap dinamika terbaru dalam perkembangan media dan studi komunikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data akademik daring seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan portal jurnal terakreditasi nasional. Peneliti menggunakan kata kunci tertentu, seperti *media power*, *critical media studies*, *political economy of media*, dan *platformization*, untuk menemukan sumber yang relevan. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi melalui tahap penyaringan judul, abstrak, dan isi, guna

memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Proses ini membantu peneliti memperoleh data yang akurat, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif. Setiap sumber literatur dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep utama, teori yang digunakan, serta argumen pokok yang disampaikan oleh penulis. Proses analisis dilanjutkan dengan pengkodean terhadap tema-tema penting seperti relasi media dan kekuasaan, komodifikasi informasi, algoritma platform digital, serta konstruksi opini publik. Setelah itu, data dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema untuk memudahkan proses interpretasi dan penyusunan hasil penelitian. Tahap berikutnya adalah interpretasi deskriptif-kritis. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menjelaskan temuan literatur, tetapi juga menghubungkannya dengan fenomena media kontemporer, khususnya dalam konteks perkembangan media digital dan komunikasi politik. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan berbagai teori untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi konseptualnya. Proses ini memungkinkan peneliti menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai posisi media dalam studi komunikasi serta peranannya sebagai alat kekuasaan sosial.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan literatur dari berbagai penulis dan jurnal yang berbeda, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan berbagai perspektif, seperti teori ekonomi politik media, teori budaya, teori komunikasi politik, dan teori platform digital. Langkah ini bertujuan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian serta meminimalkan bias interpretasi dari satu sudut pandang tertentu. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang sistematis. Penyajian dilakukan dengan menguraikan hasil temuan literatur secara runtut, menjelaskan hubungan antar konsep, serta menggambarkan implikasi media sebagai objek riset dan alat kekuasaan dalam masyarakat modern. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika media kontemporer serta memperkaya pengembangan studi komunikasi dengan perspektif kritis yang relevan terhadap tantangan media di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangan studi komunikasi kontemporer, media tidak lagi dipahami sebatas sebagai perantara penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan, melainkan sebagai struktur sosial yang memiliki kuasa simbolik. Literatur yang dianalisis menegaskan bahwa media telah menjadi institusi yang berperan dalam membentuk cara masyarakat memaknai realitas. Media menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran sosial melalui seleksi isu, penyusunan narasi, dan pembingkai informasi. Proses ini menjadikan media sebagai aktor aktif dalam produksi makna sosial, sehingga realitas yang diterima publik sering kali merupakan realitas yang telah dikonstruksi sesuai dengan kepentingan tertentu. Dengan demikian, media tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan kesadaran kolektif masyarakat modern. Kajian literatur juga memperlihatkan bahwa studi media berkembang seiring dengan perubahan teknologi komunikasi. Media yang sebelumnya bersifat satu arah melalui surat kabar, radio, dan televisi, kini berkembang menjadi media digital yang bersifat interaktif dan partisipatif. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara informasi disebarkan, tetapi juga cara masyarakat memproduksi dan mengonsumsi informasi. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi audiens pasif, melainkan juga produsen konten (*prosumer*). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi publik meningkat, kontrol utama distribusi informasi tetap berada pada perusahaan platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak serta-merta menghilangkan relasi

kekuasaan dalam media, tetapi justru menciptakan bentuk kekuasaan baru yang lebih kompleks.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan media masih menjadi faktor dominan dalam menentukan arah pemberitaan dan produksi konten. Literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa konsentrasi kepemilikan media pada kelompok konglomerasi ekonomi berdampak pada homogenisasi informasi. Media cenderung menyajikan perspektif yang sejalan dengan kepentingan pemilik modal, sementara suara kelompok marginal sering kali terpinggirkan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebebasan pers dalam praktiknya masih dibatasi oleh struktur ekonomi politik yang melingkupi industri media. Dengan demikian, media sebagai lembaga sosial berada dalam ketegangan antara idealisme jurnalistik dan kepentingan pasar. Dalam kaitannya dengan kekuasaan politik, hasil penelitian memperlihatkan bahwa media menjadi instrumen strategis dalam proses pembentukan opini publik. Media memiliki kemampuan mengarahkan perhatian masyarakat pada isu tertentu melalui mekanisme *agenda setting*. Selain itu, penggunaan *framing* memungkinkan media membentuk sudut pandang tertentu terhadap peristiwa sosial dan politik. Literatur menunjukkan bahwa kedua mekanisme ini sering dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan publik. Situasi ini menegaskan bahwa media tidak hanya melaporkan realitas politik, tetapi juga turut membentuknya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam praktik demokrasi modern. Media berfungsi sebagai ruang publik tempat berbagai ide, opini, dan kritik sosial dipertukarkan. Namun, literatur yang dianalisis mengungkapkan bahwa ruang publik media sering kali tidak sepenuhnya netral. Dominasi aktor tertentu dalam kepemilikan media dan penguasaan teknologi platform menyebabkan distribusi wacana publik tidak merata. Akibatnya, tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa media sebagai ruang demokrasi juga dapat menjadi arena dominasi kekuasaan. Perkembangan media digital semakin memperluas dimensi kekuasaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma platform digital menentukan konten apa yang muncul di layar pengguna, seberapa sering konten tersebut ditampilkan, dan kepada siapa konten diarahkan. Proses ini berlangsung secara otomatis dan sering kali tidak disadari oleh pengguna. Literatur menyebutkan bahwa algoritma tidak netral, melainkan dirancang untuk memenuhi kepentingan ekonomi platform, seperti meningkatkan durasi penggunaan dan keuntungan iklan. Dengan demikian, kekuasaan media saat ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga bersifat teknologis dan algoritmik.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa media berperan besar dalam membentuk identitas sosial dan budaya. Media merepresentasikan nilai-nilai tertentu tentang gaya hidup, kecantikan, kesuksesan, dan status sosial yang kemudian diinternalisasi oleh masyarakat. Representasi ini dapat menciptakan standar sosial baru sekaligus memperkuat stereotip tertentu. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa kelompok minoritas sering direpresentasikan secara terbatas atau bias. Hal ini menegaskan bahwa media bukan hanya sarana informasi, tetapi juga sarana produksi ideologi budaya. Di sisi lain, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa media menjadi arena perlawanan terhadap dominasi kekuasaan. Media digital memungkinkan kelompok masyarakat sipil memproduksi narasi tandingan terhadap wacana arus utama. Aktivisme digital, jurnalisme warga, dan gerakan sosial berbasis media sosial menunjukkan bahwa media juga dapat menjadi alat pemberdayaan publik. Namun, literatur menunjukkan bahwa kemampuan ini tetap dibatasi oleh kebijakan platform, sensor algoritmik, dan regulasi negara. Dengan demikian, ruang kebebasan media digital tetap berada dalam batas-batas kekuasaan tertentu.

Hasil penelitian turut menunjukkan meningkatnya fenomena disinformasi, hoaks, dan propaganda di era media digital. Kecepatan penyebaran informasi tidak diiringi dengan mekanisme verifikasi yang kuat. Literatur menegaskan bahwa situasi ini menciptakan krisis

kepercayaan publik terhadap media. Masyarakat kesulitan membedakan antara informasi faktual dan informasi manipulatif. Hal ini memperlihatkan bahwa media tidak hanya menjadi alat kekuasaan institusional, tetapi juga alat kekuasaan kelompok tertentu dalam memengaruhi opini publik secara masif. Dari perspektif akademik, hasil penelitian menunjukkan bahwa studi komunikasi semakin menekankan pendekatan kritis dalam menganalisis media. Peneliti tidak lagi cukup hanya mendeskripsikan isi pesan media, tetapi juga menelusuri relasi kuasa yang bekerja dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi politik media, teori kritis, dan studi budaya menjadi landasan utama dalam memahami media sebagai institusi kekuasaan. Hal ini menegaskan bahwa studi media tidak dapat dilepaskan dari analisis struktur sosial yang lebih luas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media sebagai objek riset memiliki karakter yang sangat dinamis dan menuntut metode penelitian yang adaptif. Perubahan cepat teknologi komunikasi membuat teori-teori klasik media perlu terus diperbarui agar relevan dengan realitas kontemporer. Literatur menegaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif sangat sesuai untuk menangkap kompleksitas fenomena media yang tidak dapat diukur hanya melalui angka statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna, ideologi, dan relasi kuasa yang tersembunyi dalam praktik media. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa media merupakan institusi strategis dalam struktur masyarakat modern. Media berfungsi sebagai ruang produksi makna, alat legitimasi kekuasaan, arena demokrasi, sekaligus medan pertarungan ideologi. Media sebagai objek riset tidak dapat dipisahkan dari media sebagai alat kekuasaan. Oleh karena itu, studi komunikasi perlu terus mengembangkan perspektif kritis agar mampu membaca peran media secara utuh, tidak hanya sebagai teknologi komunikasi, tetapi sebagai kekuatan sosial yang menentukan arah opini publik, pembentukan budaya, dan kualitas kehidupan demokratis masyarakat di era digital.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menegaskan bahwa media dalam studi komunikasi tidak lagi dapat dipahami sebagai saluran netral penyampai informasi, tetapi sebagai institusi sosial yang aktif membentuk realitas. Temuan penelitian sejalan dengan pandangan Couldry dan Mejias (2021) yang menyatakan bahwa media modern telah menjadi pusat produksi makna sosial melalui proses seleksi dan distribusi informasi. Media menentukan isu yang dianggap penting sekaligus membingkai cara masyarakat memahami peristiwa. Dengan demikian, media bukan hanya cermin realitas, tetapi aktor yang turut mengonstruksi realitas sosial. Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat posisi media sebagai struktur kekuasaan baru. Van Dijck, Poell, dan de Waal (2022) menjelaskan bahwa platform digital telah mengubah ekosistem media menjadi sistem yang dikendalikan oleh logika platformisasi, di mana perusahaan teknologi memegang kontrol utama atas arus informasi publik. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa meskipun partisipasi publik meningkat, kekuasaan distribusi informasi tetap terpusat pada korporasi digital. Situasi ini menunjukkan transformasi kekuasaan media dari institusi pers konvensional menuju perusahaan teknologi global.

Kepemilikan media juga terbukti memengaruhi arah produksi konten dan independensi jurnalistik. Temuan penelitian mendukung analisis Hardy (2021) yang menegaskan bahwa konsentrasi kepemilikan media berdampak pada homogenisasi perspektif informasi dan berkurangnya keberagaman suara publik. Media yang dimiliki kelompok ekonomi kuat cenderung menyajikan berita sesuai kepentingan pemilik modal. Hal ini memperlihatkan bahwa idealisme netralitas media sering kali berbenturan dengan realitas ekonomi industri media. Dalam konteks politik, hasil penelitian memperlihatkan bahwa media menjadi instrumen strategis pembentukan opini publik. McCombs (2023) menegaskan bahwa teori agenda setting tetap relevan dalam era digital, karena media masih menentukan isu yang menjadi perhatian utama masyarakat. Selain itu, Entman (2022) menjelaskan bahwa framing media mampu

mengarahkan interpretasi publik terhadap peristiwa sosial dan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua mekanisme ini menjadikan media sebagai alat legitimasi kekuasaan politik.

Media juga berperan sebagai ruang demokrasi, namun tidak sepenuhnya setara bagi semua kelompok sosial. Habermas (2021) menekankan bahwa ruang publik media idealnya menjadi arena diskusi rasional warga negara, tetapi dalam praktiknya sering didominasi oleh aktor ekonomi dan politik tertentu. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa distribusi wacana publik di media tidak merata, sehingga kelompok marginal sering kali tidak mendapatkan ruang representasi yang adil. Kekuasaan media semakin kompleks dengan hadirnya algoritma platform digital. Gillespie (2022) menjelaskan bahwa algoritma bukan sekadar sistem teknis, melainkan mekanisme sosial yang menentukan visibilitas informasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa algoritma mengatur apa yang dilihat publik, seberapa sering konten muncul, dan kepada siapa konten diarahkan. Kondisi ini memperlihatkan bentuk baru kekuasaan media yang bersifat tersembunyi namun sangat menentukan arus informasi Masyarakat. Media juga berperan besar dalam pembentukan identitas sosial dan budaya. Hall (2021) menegaskan bahwa representasi media membentuk cara masyarakat memahami gender, kelas, budaya, dan identitas kelompok tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sering mereproduksi stereotip dan nilai dominan, namun juga membuka ruang bagi munculnya identitas alternatif. Hal ini menegaskan bahwa media merupakan arena produksi ideologi budaya.

Di sisi lain, media digital juga membuka ruang perlawanan terhadap dominasi kekuasaan. Castells (2022) menjelaskan bahwa jaringan komunikasi digital memungkinkan terbentuknya gerakan sosial berbasis media yang mampu menantang wacana arus utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivisme digital dan jurnalisme warga menjadi bentuk baru partisipasi publik. Namun, ruang ini tetap dibatasi oleh regulasi platform dan kebijakan sensor digital. Permasalahan lain yang muncul adalah meningkatnya disinformasi dan hoaks. Wardle dan Derakhshan (2021) menegaskan bahwa era digital menciptakan ekosistem informasi yang rentan terhadap manipulasi narasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kesulitan membedakan informasi valid dan palsu, sehingga media tidak hanya menjadi sarana edukasi publik, tetapi juga alat propaganda kelompok tertentu. Situasi ini memperkuat urgensi literasi media kritis.

Dalam ranah akademik, studi komunikasi semakin menekankan pendekatan kritis. Fuchs (2023) menjelaskan bahwa media harus dianalisis melalui perspektif ekonomi politik untuk mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik produksi informasi. Temuan penelitian mendukung pandangan ini bahwa analisis media tidak cukup berhenti pada isi pesan, tetapi harus menelusuri struktur kekuasaan yang melingkupinya. Media sebagai objek riset juga bersifat dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Krotz (2022) menyatakan bahwa transformasi media menuntut pembaruan teori dan metode penelitian agar relevan dengan perubahan komunikasi digital. Temuan penelitian menegaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas media yang tidak dapat diukur hanya dengan data kuantitatif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa media sebagai objek riset dan media sebagai alat kekuasaan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan pandangan Couldry (2024), media modern adalah institusi yang menghubungkan produksi makna dengan struktur kekuasaan sosial. Oleh karena itu, studi komunikasi perlu terus mengembangkan perspektif kritis agar mampu memahami media bukan hanya sebagai teknologi komunikasi, tetapi sebagai kekuatan sosial yang membentuk opini publik, budaya, dan demokrasi kontemporer.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa media dalam studi komunikasi kontemporer tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai saluran penyampaian informasi, melainkan sebagai institusi sosial yang aktif membentuk realitas masyarakat melalui proses seleksi isu, framing pesan, dan distribusi informasi yang sarat kepentingan. Media berkembang menjadi objek riset multidimensional yang mencakup aspek teknologi, ekonomi, budaya, dan relasi kekuasaan, sehingga menuntut pendekatan kritis dalam kajiannya. Kepemilikan media oleh kelompok ekonomi dan politik tertentu memengaruhi independensi konten serta arah opini publik, sementara kehadiran platform digital dan algoritma memperluas bentuk kekuasaan media yang bersifat tersembunyi namun menentukan arus informasi. Media juga berperan dalam pembentukan identitas sosial dan budaya, mereproduksi nilai dominan, sekaligus membuka ruang negosiasi identitas baru, tetapi di sisi lain menghadirkan tantangan serius berupa disinformasi dan manipulasi narasi yang mengancam kualitas ruang publik. Dengan demikian, media sebagai objek riset dan sebagai alat kekuasaan merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, sehingga studi komunikasi perlu terus mengembangkan perspektif reflektif-kritis agar mampu memahami peran media secara utuh sebagai kekuatan sosial yang memengaruhi opini publik, budaya, dan demokrasi di era digital.

REFERENSI

- Castells, M. (2022). *Networks of outrage and hope in the digital age*. Polity Press.
- Couldry, N. (2024). The mediated construction of social reality in the age of digital platforms. *Journal of Communication*, 74(1), 1-18.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2021). *The costs of connection: How data is colonizing human life*. Stanford University Press.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2023). Data colonialism and the reconfiguration of media power. *Communication Theory*, 33(2), 101-120.
- Deuze, M. (2023). Media work and research in a digital-first world. *Media, Culture & Society*, 45(4), 623-640.
- Entman, R. M. (2022). Framing media power in political communication. *Journal of Communication*, 72(3), 315-330.
- Fuchs, C. (2022). Digital capitalism and the political economy of media. *TripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 20(1), 1-25.
- Fuchs, C. (2023). *Digital capitalism: Critical theory of communication in the digital age*. University of Westminster Press.
- Gillespie, T. (2022). Platforms, algorithms, and cultural power. *Social Media + Society*, 8(2), 1-12.
- Gray, J., & Lotz, A. D. (2022). Television, streaming, and the transformation of cultural representation. *International Journal of Communication*, 16, 1520-1538.
- Habermas, J. (2021). *The structural transformation of the public sphere: Revisited in the digital era*. MIT Press.
- Hall, S. (2021). Representation and media ideology in contemporary culture. *Cultural Studies Review*, 27(1), 15-30.
- Hardy, J. (2021). *Critical political economy of the media: Ownership and control*. Routledge.
- Krotz, F. (2022). Mediatization and transformations of communication research. *Communication Theory*, 32(2), 240-255.
- McCombs, M. (2023). Agenda setting in the digital information environment. *Mass Communication and Society*, 26(1), 1-18.
- Strömbäck, J., & Esser, F. (2021). The mediatization of politics: Understanding the transformation of political communication. *Journalism Studies*, 22(3), 357-373.

- Van Dijck, J. (2021). Seeing the forest for the trees: Platformization and media ecosystems. *New Media & Society*, 23(9), 2807-2824.
- Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2022). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2022). Information disorder in digital media environments. *Journal of Digital Media & Policy*, 13(1), 7-24.